

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin (2006). *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ (2019). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*, Jakarta: BPK RI, 2023, hlm. 9.
- Bambang Sunggono, 2009, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 45.
- Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore, *“Overview of CPIB Powers and Procedures”*, Singapore Government Publications, 2020, hlm. 5–7.
- Enny Agustina, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 64
- Ermansyah Djaja, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 76–78.
- Evi Hartanti, 2008, *“Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.
- GLI: Global Legal Insights, *Bribery & Corruption Laws and Regulations 2025 – Singapore*
- Gustav Radbruch, 2019, *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 78-80
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley:

- University California Press, 1978), Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007, hlm. 34-37.
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008, hlm. 8.
- I. Putu Gede Arya Widiada, 2022, *Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 43-45.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2020, hlm. 89.
- _____, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 201–203.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konpres, 2006, hlm. 66.
- _____, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 177–178.
- John Bordley Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 52–53.
- Kamal Hidjza, 2010, “Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia”, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 35.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 375.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2023*, Jakarta: KPK, 2023.
- Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14–15.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 85
- M. Fadli Andika, *Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Modern*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 193–195.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 215.

- Magdalena Sepúlveda, Theo van Banning, Gerd O. van Genugten, dan Cees Boone, *Human Rights Reference Handbook*, Costa Rica: University for Peace, 2004, hlm. 14–15.
- Martin Scheinin, *Surveillance and Human Rights: Thematic Study*, OHCHR, Geneva, 2015, hlm. 10–12.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2021, hlm. 45.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 102–104.
- National Anti-Corruption Commission Thailand, *Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (1999)*, Bangkok, diterbitkan 1999, hlm. 4–6.
- Nur Basuki Winamno, 2008, “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*”, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.
- Nurmayanti, 2009, “*Hukum Administrasi Daerah*”, Universitas Lampung Bandar, Lampung, hlm. 26.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *General Comment No. 16: The Right to Privacy (Article 17 ICCPR)*, 1988, hlm. 2–3.
- Parliament of Malaysia, *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694)*, Kuala Lumpur, diundangkan 6 Januari 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, hlm. 135–136.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.
- Republik Filipina, *Republic Act No. 4200 – An Act to Prohibit and Penalize Wire-Tapping and Other Related Violations of the Privacy of Communication*, Manila, disahkan 19 Juni 1965.

- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 112–113.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 142.
- _____, *Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2012, hlm. 85.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 4.
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 57–59.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 42.
- Soerjono Soekanto, 1986, “Penganatar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta, hlm. 125.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 34
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005, hlm. 160-161.
- Susi Dwi Harijanti, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 143–145.
- United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, New York: UNODC, 2003, hlm. 9–11.
- W. Djafar, *Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi di Indonesia*, Hukumonline Learning Center, 2022, hlm. 8–9.

ARTIKEL / KARYA ILMIAH LAINNYA

- Agung Sugiarto. (2019). “Legalitas Penyadapan dalam UU ITE,” *Jurnal Rechtsens*. Vol. 8, No. 1 (2019).
- Ahmad Hudi Prayogo, “Transparansi Penyadapan dalam Penegakan Hukum Pertambangan”, *Jurnal Recht Vinding*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 355–357.

- Ahmad Sofian, “Kewenangan Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 155–157.
- Alfred Maurice de Zayas, “The Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Digital Surveillance”, *International Journal of Human Rights*, Vol. 24, No. 10 (2020), hlm. 1535–1554.
- Andi Marwan, “Kewenangan Penyidik Kejaksaan dalam Penanganan Tipikor,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4 (2021), hlm. 80.
- Asman Abdullah, “Interpolating ASEAN Anti-Corruption Regulatory Frameworks: A Comparative Study of Legal Basis for Surveillance Measures”, *Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 211–213.
- Bivitri Susanti, “Kelembagaan Anti-Korupsi dan Problematika Revisi UU KPK.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 445–447.
- Dwi Siregar, “Problematika Kewenangan Penyadapan Kejaksaan,” *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 156.
- Febri Diansyah, “Legal Issue dalam Pembuktian Perkara Korupsi: Studi pada Kasus Jiwasraya dan Asabri”, *Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 44–47.
- H. Christianto, “Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM”, *Jurnal ADIL*, 2018, hlm. 12–14.
- H. Salim, “Keabsahan Penyadapan dalam Sistem Pembuktian Pidana: Perspektif Exclusionary Rule”, *Jurnal ADIL*, 2018, hlm. 65–68.
- Herlambang Perdana Wiratman, “Justice as Fairness dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 1, 2021, hlm. 88–90.
- _____, “Problematika Pengaturan Kewenangan Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022, hlm. 455–457.
- I Made Dwi Narendra Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, 2022, “Peranan Intelijen Kejaksaan dalam

- Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2022, hlm. 12-16.
- Iwan Sofyan, “Model Pengaturan Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, *PILAR: Philosophia Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 43-70.
- Laurensius Arliman S., 2018, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, Jurnal Ilmu Huku, Vol. 1, No. 1 (April 2018), hlm. 1-21
- Mochammad Sidiq, “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi melalui Penyadapan,” *Jurnal Peradilan*, Vol. 11, No. 3 (2020), hlm. 213.
- Muslih, M. (2017). *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum, 4(1), 130-152.
- Paolo Mauro, "Corruption and growth." *The quarterly journal of economics*, Vol. 110, No. 3 (1995), hlm. 681-712.
- Rahmat Madani, dan Datir Siregar, 2022, “Pengaruh Penyadapan Terhadap Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 487-498.
- Tengku Ahmad Rithauddeen Tengku Ismail, “Comparative Legal Study on Interception Laws in ASEAN and Their Human Rights Implications”, *ASEAN Anti-Corruption Journal*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 23–25.
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966–1990*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 237–240.
- Transparency International, *Global Corruption Report 2023*, Berlin: TI Secretariat, 2023, hlm. 14.
- Yasmirah Mandasari Saragih, dan Muhammad Arif Sahlepi, 2019, “Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol. 1, No. 2, April 2019.

Yudi Kristiana, “Disharmonisasi Kewenangan KPK dan Kejaksanaan dalam Penyidikan Korupsi”, *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 214–216.

INTERNET

CNN Indonesia, “Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Timah Rp271 T, Gunakan Penyadapan”, 16 Oktober 2023. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com>.

ELSAM, RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di Undang-Undang Tata Cara Penyadapan, dimuat dalam <http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=1381&lang=in>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

FSR and Corporate Crime Notes, Thailand's new anti-corruption law targets foreign corporates, (Herbert Smith Freehills Kramer LLP, 18 September 2018), diakses pada 30 November 2025, pukul 17:12 WIB, https://www.hsfkramer.com/notes/fsrandcorcrime/2018-09/thailands-new-anti-corruption-law-targets-foreign-corporates?utm_source=chatgpt.com

ICLG: Cybersecurity Laws and Regulations, Cybersecurity Laws and Regulations Indonesia 2026, (21 November 2025), diakses pada 30 November 2025, pukul 17:01 WIB, https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations/indonesia?utm_source=chatgpt.com

Wikisource, *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009.pdf/47*, (18 November 2023), diakses pada 30 November 2025, pukul 17:01 WIB, https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Malaysian_Anti-Corruption_Commission_Act_2009.pdf/47&oldid=13647875

Free Online Access, (5 Desember 2024), diakses pada 30 November 2025, pukul 18:51 WIB, https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/singapore/?utm_source=chatgpt.com

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

_____, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

_____, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

_____, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, LN.2021/No.298, TLN No. 6755, Ps 1 Ayat (1).

_____, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, LN.2021/No.298, TLN No. 6755, Ps 1 Ayat (3).

_____, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Ps 30C huruf (i).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010;
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Universal Declaration of Human Rights, 1948, Pasal 12 dan 17; *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 17.

LAINNYA (TESIS, DISERTASI, MAKALAH)

Gea, M. Y. A., 2023. *Implikasi Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21/Puu-XII/2014 (Studi Putusan Nomor 41/Pid. Pra/2022/PN Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area), hlm. 17.

Siagian, A., 2024, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), hlm 23.